

Model Implementasi dan Problematika Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Fraud Di Era Digital

Ainun Khafifah ^{1*}, Haliah ², Nirwana ³, Muh Alief Fahdal Imran Oemar ⁴,
ainunkhafifah029@gmail.com ¹, haliah@fe.unhas.ac.id ², nirwana_ni@yahoo.com ³
alieffahdal@unhas.ac.id ⁴

Pascasarjana fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar ^{1*}
Universitas Hasanuddin, Makassar ^{2,3,4}

Abstrak

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan dan menggambarkan atribut-atribut pungli yang terjadi di area publik pemerintah terdekat dalam waktu yang terkomputerisasi dan mendorong model eksekusi dan isu-isu Akuntansi Area Publik untuk mencegah misrepresentasi yang terjadi di area publik di masa yang akan datang. Pemeriksaan yang diselesaikan adalah penelitian survei tulisan yang diperoleh dari artikel-artikel yang sesuai dengan subjek eksplorasi untuk penyelidikan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri pemerasan di ruang publik yang terjadi di masa yang sudah lanjut antara lain pemanfaatan penilaian sesat tentang tugas inovasi komputerisasi dalam pelaksanaan kewajiban pembukuan publik, penggunaan inovasi komputerisasi untuk meningkatkan potensi peluang untuk melakukan misrepresentasi, membuat sebagian besar masalah kesalahan manusia dan tidak adanya informasi dalam pemanfaatan inovasi. terkomputerisasi, memanfaatkan barang-barang inovasi canggih, hingga melakukan pemerasan. Pemanfaatan Akuntansi Area Publik dapat mencegah pemerasan di area publik dalam periode komputerisasi jika dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi misrepresentasi, seperti tanggung jawab pelaksanaan, dan melakukan teknik khusus, pendekatan dua pandangan dan prosedur pencegahan.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Public, Fraud, Era digital

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Inovasi yang terus berkreasi mempengaruhi siklus yang berbeda dalam kehidupan manusia. Efek ini dapat berupa efek tertentu, yang mendukung peningkatan kecukupan dan efektivitas latihan manusia, atau bahkan efek pesimis, khususnya sebagai penyalahgunaan inovasi untuk penambahan individu dan membuat kemalangan untuk pertemuan yang berbeda. Sisi-sisi yang berbeda dari pengaruh inovasi ini memerlukan perubahan cara pandang terhadap inovasi dalam pandangan perenungan yang cerdas untuk menjamin bahwa kemajuan mekanis benar-benar menjadi alat yang memudahkan orang untuk menyelesaikan latihan mereka. Efek normal dari kemajuan mekanis pada pembukuan area terbuka adalah eksekusi yang lebih sederhana dan lebih cepat dari berbagai proses pembukuan, serta data yang lebih tepat yang dibuat dari siklus ini.

Namun demikian, hal ini harus dilakukan jika perkumpulan yang berhubungan dengan sistem pembukuan tersebut dapat menggunakan barang-barang inovasi secara ideal dan dengan tujuan yang menggembirakan, khususnya untuk lebih mengembangkan administrasi kepada masyarakat luas (Jasa Eksplorasi dan Inovasi Republik Indonesia). Indonesia, 2018). Kemampuan dan alasan positif untuk melibatkan inovasi dalam sistem pembukuan akan mendorong kecakapan dan kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Kemudian lagi, kapasitas yang digabungkan dengan tujuan yang

merugikan, khususnya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, akan memicu pemerasan. Menurut Omar, Nawawi, dan Salin (2016), pungutan liar merupakan risiko bisnis yang dapat muncul pada setiap elemen bisnis, baik pada organisasi negara maupun organisasi eksklusif. Organisasi yang besar atau kecil tidak dapat dipisahkan dari potensi pungli yang terjadi di dalamnya, sehingga bisa dikatakan tidak ada organisasi yang kebal dari penyakit yang disebut misrepresentasi.

Sesuai hipotesis segitiga pemerasan, misrepresentasi dapat terjadi sebagai akibat dari tiga faktor utama yang menyebabkannya, khususnya ketegangan, peluang, dan pertahanan. Selain itu, ada juga hipotesis permata misrepresentasi yang merupakan peningkatan dari segitiga pemerasan dengan satu elemen tambahan, menjadi kapasitas spesifik (Eyo Bassey, 2018). Substansi hipotesis menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pemerasan mendapat hiburan dari dua klasifikasi variabel, yaitu unsur dalam khusus sebagai kapasitas dan pertahanan, dan variabel luar yang memasukkan ketegangan dan peluang. Jika dikaitkan dengan kemajuan-kemajuan mekanik yang telah sampai pada tingkat komputerisasi seperti sekarang ini, kemampuan yang digerakkan oleh orang-orang dalam menggunakan barang-barang inovasi canggih dapat menjadi kekuatan untuk menyelesaikan pemerasan. Selain itu, pemanfaatan inovasi terkomputerisasi yang masih belum merata karena informasi dan kemampuan menggarap inovasi yang belum diklaim oleh semua elemen bisnis, termasuk masyarakat luas, memberikan peluang yang luar biasa untuk melakukan pungli. Misrepresentasi secara komprehensif dapat dicirikan menjadi tiga macam kegiatan, yaitu penyalahgunaan sumber daya tertentu, pemberitaan yang menyesatkan dalam laporan anggaran, dan pencemaran nama baik (Sihombing, Erlina, Rujiman, dan Muda, 2019). Sesuai dengan konsekuensi dari tinjauan yang dipimpin oleh Bagian Hubungan Dijamin Misrepresentasi Inspektur Indonesia (ACFE-IC), debasement adalah jenis pemerasan yang paling terkenal di Indonesia, diikuti oleh penyalahgunaan sumber daya, dan akhirnya adalah pemerasan ringkasan fiskal.

Bertambahnya jumlah pemalsuan, khususnya kasus pencemaran nama baik sebagaimana informasi di atas kemungkinan besar terkait dengan hadirnya inovasi-inovasi canggih yang memberikan kemampuan lebih menonjol dan peluang membuka pintu bagi para pelaku pemerasan. Bagaimanapun, ini belum dikonsentrasikan oleh para analis sebelumnya. Kenyataannya, pemahaman tentang kualitas misrepresentasi yang terjadi di area publik pada periode komputerisasi akan sangat berguna dalam menemukan sistem untuk membedakan tanda-tanda pemerasan serta teknik untuk mencegah misrepresentasi di kemudian hari, dan dapat bekerja dengan penyelenggaraan Pembukuan Area Umum untuk mencapai tujuan penyampaian data moneter yang andal. tepat. Pembukuan area publik adalah komponen pembukuan rahasia yang diterapkan dalam tindakan asosiasi publik. Pembukuan area publik memiliki tingkat pendirian dan divisi negara yang tinggi di bawahnya, seperti legislatif lingkungan, perusahaan, kelompok ideologis, dan asosiasi non-manfaat lainnya (Halim, 2016). Oleh karena itu, latihan pembukuan area publik setara dengan latihan pembukuan pada umumnya, hanya saja ada batasan untuk mitra yang merupakan pihak dari otoritas publik dan wilayah lokal yang lebih luas.

Metodologi hipotesis yang digunakan untuk memaknai pungli dalam penelitian ini adalah melakukan pembukuan, yaitu hipotesis yang menjelaskan hubungan antara kerangka data pembukuan dan cara berperilaku manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Kutluk (2017), melakukan pembukuan berkonsentrasi pada cara berperilaku manusia, baik individu yang mengisi sebagai pemegang buku atau selain pemegang buku, terkait dengan dampaknya terhadap kerangka pembukuan dan unsur-unsur yang membentuk cara berperilaku itu. berasal dari kerangka pembukuan. Profesional pembukuan sosial, yang merupakan pemegang pembukuan perilaku, memiliki tugas membedah cara manusia berperilaku dan kesan manusiawi atas pekerjaannya, kewajiban, organisasi, dan koleganya, untuk menyampaikan data perilaku kepada klien sebagai alasan navigasi dan mencari tahu harapan. sehubungan dengan cara berperilaku manusia di masa

depan, serta untuk memutuskan metodologi yang paling cocok untuk mengubah atau mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Efek samping dari pemeriksaan perilaku ini menggabungkan bagaimana orang bertindak dan unsur-unsur yang mendasari pengembangan cara berperilaku ini, serta usulan untuk lebih mengembangkan cara berperilaku yang dianggap rusak (Supriyono, 2018). Lebih lanjut dijelaskan oleh Supriyono (2018), hubungan yang dimaksud bersifat proporsional, dimana cara berperilaku manusia dapat mempengaruhi data pembukuan dan pilihan bisnis yang diambil. Lagi pula, data pembukuan juga dapat memengaruhi cara manusia berperilaku dan pilihan bisnis yang diambil.

Akuntansi Keperilakuan. Penyelenggaraan pembukuan berkonsentrasi pada cara berperilaku manusia, baik orang yang berfungsi sebagai pemegang pembukuan maupun selain pemegang pembukuan, sebanding dengan dampaknya terhadap kerangka pembukuan dan unsur-unsur yang membentuk perilaku yang berasal dari kerangka pembukuan (Akay, Poputra, dan Kalalo, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut, para pelaksana pembukuan sosial, khususnya pemegang pembukuan perilaku, memiliki tugas membedah cara berperilaku dan pandangan manusia terhadap pekerjaan, kewajiban, organisasi, dan rekan kerja mereka, untuk diteruskan kepada klien data perilaku sebagai alasan untuk navigasi dan membentuk harapan sehubungan dengan perilaku manusia di lingkungan kerja. masa depan, serta untuk memutuskan sistem yang paling tepat untuk mengubah atau mengarahkan perilaku manusia sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efek samping dari pemeriksaan perilaku ini mencakup bagaimana orang bertindak dan unsur-unsur yang mendasari perkembangan cara berperilaku tersebut, serta saran untuk lebih mengembangkan cara berperilaku yang dianggap rusak (Supriyono 2018).

Sebagaimana dikemukakan oleh Supriyono (2018), tujuan penyelenggaraan pembukuan antara lain: 1. Menyelidiki faktor-faktor yang memaknai cara berperilaku manusia yang dapat diterapkan dalam kerangka pembukuan. 2. Bentuk dan berikan data tentang faktor-faktor perilaku ini kepada para pemimpin. 3. Data lengkap yang berlaku untuk bagian dari cara berperilaku manusia yang diharapkan oleh kepala dan dituangkan dalam laporan anggaran. Luas Tata Laksana Pembukuan adalah (Supriyono 2018): 1. Dampak tingkah laku manusia terhadap rencana, kesiapan, dan pemanfaatan kerangka data, dimana pembukuan sosial menggambarkan hubungan antara perspektif nilai dan mentalitas penyelenggaraan suatu organisasi dalam mengendalikan sistem pembukuan dengan unsur-unsur dari setiap komponen. di dalam organisasi. 2. Dampak kerangka pembukuan terhadap cara berperilaku manusia, dimana pembukuan sosial menganalisis dampak kerangka pembukuan terhadap inspirasi, efisiensi, siklus dinamis, pemenuhan pekerjaan, dan partisipasi antar individu dari asosiasi. 3. Mengantisipasi perilaku dan membentuk teknik untuk mengubah cara berperilaku manusia, dimana pembukuan sosial mengkaji pekerjaan kerangka pembukuan tentang perubahan cara berperilaku manusia.

Fraud, Dalam arti sebenarnya, pemerasan dapat diartikan sebagai representasi yang keliru; keliru; atau penyelewengan (Said, Alam, Karim, dan Johari 2018). Misrepresentasi adalah demonstrasi yang dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena kecerobohan atau ketidaktahuan, untuk memperoleh keuntungan moneter dengan cara curang (Peprah 2018, Zanaria 2017). Pemerasan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu berbagai pihak, sehingga pihak yang tertipu mengalami kerugian dan pihak yang dirugikan memperoleh keuntungan (Hantono 2018). Misrepresentasi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam kegiatan, khususnya (Antarwiyati dan Purnomo 2017, Sihombing, Erlina, Rujiman, dan Muda 2019): 1. Penyalahgunaan sumber daya, adalah jenis misrepresentasi yang paling mudah diidentifikasi mengingat fakta bahwa itu selesai sebagai penyalahgunaan atau perampokan sumber daya, sehingga sangat mungkin untuk menentukan atau mengukur kemalangan yang dialami karena pemerasan. 2. Penjelasan yang menyesatkan, yang merupakan representasi keliru yang ditujukan sebagai perancangan moneter dalam pengenalan laporan anggaran organisasi untuk menyembunyikan keadaan keuangan organisasi yang sebenarnya. 3. Penghinaan adalah

sejenis pemerasan yang sulit dibedakan karena dilakukan dalam upaya bersama dengan berbagai perkumpulan dalam satu organisasi yang terkoordinasi dan memiliki pendekatan kerja yang tepat.

Kesalahpahaman semacam ini pada umumnya terjadi di negara-negara non-industri dengan kepolisian yang lemah banyak pertemuan yang tidak tahu tentang pentingnya administrasi perusahaan yang baik. Sesuai dengan hipotesis Misrepresentation Triangle yang dibuat oleh Donald R. Cressey, misrepresentasi dapat terjadi karena disebabkan oleh tiga elemen utama, yaitu ketegangan, peluang, dan pertahanan (Abri, Arumugam, dan Balasingam 2019, Aksa 2018). 1. Tekanan Seorang individu dapat melakukan misrepresentasi karena ketegangan yang didapatkannya. Ketegangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ketegangan moneter tertentu, ketegangan untuk sifat buruk yang terus-menerus, tekanan kerja, dan ketegangan lainnya. 2. Opportunity adalah faktor luar yang membuat seseorang terkendala untuk melakukan misrepresentasi. Komponen ini pada umumnya muncul ketika ada sistem kontrol yang tidak berdaya, seperti tidak adanya pengawasan atau pemeriksaan, yang membuat seseorang melihat lubang dan memanfaatkannya untuk penambahan individu. 3. Pembelaan (Legitimisasi) Variabel ketiga ini berasal dari dalam diri individu sebagai perenungan yang menganggap bahwa demonstrasi misrepresentasi yang dilakukan adalah sesuatu yang khas dan dapat diakui secara etis.

Selain hipotesis segitiga sesat, ada juga hipotesis pemerasan batu mulia yang memiliki satu variabel tambahan selain tiga unsur yang dirujuk dalam segitiga pemerasan, yaitu faktor limit. Sesuai Ruankaew (2016), batas menyinggung situasi atau kemampuan individu dalam sebuah organisasi yang dapat memungkinkan dia untuk mengatur atau mengambil keuntungan dari kesalahan representasi pintu terbuka yang tidak dapat diakses oleh orang lain. Mengingat hal ini, cenderung terlihat bahwa untuk memiliki pilihan untuk melakukan pemerasan, persyaratan individu untuk memiliki batas, sebagai sifat dan kapasitas yang diharapkan untuk melihat kesalahan representasi pintu terbuka yang berharga dan memiliki pilihan untuk menggunakannya untuk membantu diri mereka sendiri (Sujeewa, Yajid, Azam, dan Dharmaratne 2018).

Atribut dan batasan orang untuk memiliki pilihan untuk melakukan misrepresentasi meliputi: 1. Kedudukan atau kemampuan yang sah dalam pergaulan; misalnya, seorang Kepala yang dapat memengaruhi dan menyelesaikan kesalahan penyajian pada premis yang berkelanjutan. 2. Memiliki wawasan untuk memanfaatkan kekurangan dari kerangka pembukuan dan pengendalian batin, serta memahami cara kerja kerangka tersebut dan kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan. 3. Citra diri dan keyakinan bahwa perilaku palsu tidak akan dibedakan. Hasil dari pungli yang dilakukan juga akan memperluas kepastian untuk melakukan kesalahan representasi di masa depan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. 4. Kemampuan untuk benar-benar mengelola tekanan karena pertaruhan yang didapat dan mengawasi pemerasan dalam jangka waktu yang lama.

Laporan Keuangan, Menurut Yayasan Pembukuan Indonesia (2016), ringkasan fiskal penting untuk perincian moneter yang itemnya terdiri dari proklamasi manfaat dan kemalangan, laporan aset, laporan perubahan posisi moneter, laporan dan catatan yang berbeda, dan item ilustrasi dalam konten laporan moneter. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan informasi keuangan organisasi, yang dirangkum sebagai pengumuman gaji, laporan aset, dan laporan lainnya, yang digunakan sebagai sumber data penting bagi pimpinan dan pihak terkait yang berkepentingan. Menurut Septarini dan Papilaya (2016), ringkasan anggaran adalah sumber penting data moneter yang dibutuhkan oleh berbagai individu yang terlibat untuk digunakan sebagai sumber perspektif dalam arah yang penting. Selanjutnya, data yang dimuat dalam laporan fiskal harus berkualitas baik sesuai dengan atribut yang ditetapkan oleh otoritas publik.

Ringkasan fiskal siap ditentukan untuk memberikan data tentang posisi moneter, pelaksanaan moneter, dan pendapatan zat yang berguna bagi sebagian besar klien

laporan anggaran dalam mengejar pilihan keuangan dan menunjukkan tanggung jawab eksekutif mengenai pemanfaatan aset bersama dengan dewan (Wahyuni dan Budiwitjaksono 2017). Ringkasan anggaran mengungkap kondisi keuangan organisasi dalam tiga cara, khususnya (Enyi 2019): 1. Melalui catatan moneter yang melaporkan sumber daya, kewajiban, dan nilai pemilik organisasi. 2. Melalui penjelasan gaji yang masuk akal tentang keuntungan dan kerugian organisasi. 3. Melalui penjelasan pendapatan yang menyajikan data tentang mata air uang dan pemanfaatannya.

Penelitian Terdahulu. Pada Penelitian Putri Ariella Belinda, Nevi Costari Yang Berjudul Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. Terdapat Hasil Menunjukkan Bahwa Setiap Instansi Pemerintah Harus Menerapkan Akuntansi Sektor Publik Karena Dapat Mempermudah Dan Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan. Dan Pada Penelitian Adi Faisal Aksa Yang Berjudul Pencegahan Dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle, Terdapat Hasil (1) Ada Empat Motif Dalam Melakukan Korupsi; (2) Pencegahan Dan Pendeteksian Korupsi Dapat Dilakukan Dengan Pemberian Sanksi, Perbaikan Sistem Pengendalian Intern, Peningkatan Moral Dan Etika, Serta Melakukan Investigasi Terhadap Laporan Keuangan; Dan (3) Ada Tujuh Kontribusi Yang Diberikan Fraud Triangle Dalam Pemberantasan Korupsi.

Metode Analisis

Eksplorasi ini adalah jenis yang berbeda dengan metodologi subjektif. Menurut Creswell (2014), eksplorasi berbeda subjektif adalah penelitian yang berarti menyelidiki titik di bawah konsentrasi sehingga dapat diperoleh kejelasan yang pasti dan selesai. Melalui metode ini, spesialis ingin memperoleh data yang dapat digunakan untuk menggambarkan faktor, efek samping, atau kondisi yang menjadi fokus pemeriksaan. Informasi penelitian sebagai informasi pilihan yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, khususnya dengan mengumpulkan spekulasi, informasi penelitian atau penemuan-penemuan dalam pemeriksaan masa lalu dengan berbagai sumber yang berhubungan dengan titik eksplorasi yang akan direnungkan. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dibedah dengan teknik pemeriksaan subjektif dengan 3 tahap penyelidikan sebagai berikut (Bungin 2017): 1. Penurunan informasi Analisis menganalisis informasi untuk memulihkan informasi yang relevan dan mencegah informasi yang tidak sesuai tinjauan ini. 2. Penyajian Informasi Setelah informasi yang didapat dikurangi, kemudian informasi tersebut diperkenalkan sebagai penggambaran, garis besar, hubungan antar kelas, diagram alur dan semacamnya, sehingga lebih mudah untuk diselidiki dan diterjemahkan. 3. Membuat Penentuan Berakhir dalam pemeriksaan subjektif adalah penemuan-penemuan yang diperoleh dari pemeriksaan informasi untuk menjawab masalah penelitian. Penyelidikan dilakukan secara induktif dengan memusatkan perhatian pada perenungan dan pemahaman analisis yang mengacu pada hipotesis yang bersangkutan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Periode komputerisasi menyajikan pandangan dunia lain dalam bidang pembukuan, bahwa kemajuan mekanis dengan setiap item mereka dipandang cocok untuk mencocokkan pekerjaan penting pembukuan dalam menyelesaikan berbagai latihan pembukuan yang penting bagi organisasi. Pencatatan keuangan hingga pemeriksaan informasi keuangan sebagian telah dibagikan dengan aplikasi dan pemrograman PC alih-alih bergantung pada ketepatan dan keakuratan seorang

pemegang buku karena alasan produktivitas dan kecukupan yang jauh lebih baik. Jika dilihat dari satu sisi saja, hal ini merupakan dampak positif dari inovasi dalam memfasilitasi kewajiban pemegang buku, sehingga pemegang buku dapat fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh PC (Rini 2019). Bagaimanapun, menurut satu perspektif lagi, ini benar-benar menghadirkan kesulitan dan bahaya baru yang sangat terbelakalai, khususnya kemungkinan salah tafsir dengan menggunakan inovasi terkomputerisasi dan dengan melibatkan tujuan di balik persyaratan untuk kelangsungan hidup dan produktivitas sebagai premis untuk menutupi petunjuk pemerasan dilakukan dan menimbulkan sentimen tentang perlunya pemanfaatan inovasi yang canggih. yang memungkinkan pemerasan sulit dikenali dan berlangsung cukup lama.

Tantangan dan bahaya utama yang sifatnya sangat esensial adalah pada mentalitas manusia itu sendiri yang mengharapkan bahwa mesin dan inovasi, untuk situasi ini inovasi data yang menjadikan domain komputerisasi, dapat membantu manusia, khususnya panggilan pembukuan, dalam melengkapi kemampuan pembukuan (Cahyadi 2019). Faktanya, inovasi dibuat untuk membantu orang melakukan pekerjaan mereka dengan lebih benar dan efektif, sehingga akan terus terbuka pintu bagi SDM untuk mengambil bagian dalam siklus penting yang berbeda dalam semua masalah sehari-hari (Kruskopf et al. 2019). Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk turut serta membina kemampuannya agar terus menerus menjadi lebih baik melalui variasi perbaikan mekanis di sekitar mereka. Bisa dikatakan, masyarakat harus siap secara efektif untuk melibatkan inovasi sebagai instrumen peningkatan diri dan profesi dengan terus belajar (Putritama, 2019). Oleh karena itu, pandangan yang menggembirakan tentang kehadiran inovasi terkomputerisasi sangat penting untuk menempatkan inovasi sebagai bahaya atau sebagai ujian yang dapat digunakan untuk perbaikan batas diri.

Isu yang muncul dari penilaian sesat tentang pekerjaan inovasi terkomputerisasi adalah kesempatan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin untuk penambahan individu dengan menyesatkan perkumpulan yang tidak memiliki informasi yang cukup tentang pemanfaatan inovasi canggih dalam mendukung sistem pembukuan. Hal ini sesuai dengan ide segitiga pemerasan dan batu mulia yang salah mengartikan sehubungan dengan pintu yang terbuka dan kemampuan untuk melakukan pemerasan dengan menggunakan peningkatan inovasi canggih dan informasi serta kapasitas yang miring untuk melibatkan inovasi ini dalam organisasi tertentu (Ruankaew 2016) . Hadirnya inovasi terkomputerisasi, terutama dengan item-itemnya sebagai informasi besar dan komputasi terdistribusi, kemudian, pada saat itu, ada kecenderungan besar bahwa organisasi yang menerapkan kemajuan ini akan mengubah teknik untuk memperkirakan sumber daya mereka berdasarkan apa yang awalnya diharapkan untuk dilakukan. memanfaatkan inovasi terkomputerisasi untuk mengukur sumber daya mereka, sehingga semua pekerjaan menjadi tanpa kertas dan sangat tunduk pada pekerjaan penggunaan dan penimbunan terkomputerisasi (Layanan Eksplorasi dan Inovasi Republik Indonesia, 2018).

Pemanfaatan inovasi terkomputerisasi menawarkan produktivitas dan kelangsungan hidup yang jauh lebih tinggi, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan potensi kesalahan representasi karena semua sumber daya tidak sepenuhnya ditentukan oleh proses input informasi. Kesalahan terkecil dalam input informasi, akan mempengaruhi semua data yang dihasilkan oleh aplikasi. Untuk situasi ini, kesalahan dapat disebabkan oleh kecerobohan, atau tidak adanya kemampuan untuk mengerjakan inovasi, atau karena pemerasan. Salah satu item inovasi canggih yang dianggap berhasil jika terjadi misrepresentasi adalah mata uang digital, khususnya uang terkomputerisasi yang dieksekusi dengan memanfaatkan inovasi kriptografi. Bentuk uang digital memiliki empat atribut utama, yaitu terdesentralisasi, tidak diketahui, tidak dapat dikendalikan, dan tidak ada ekspansi yang tersedia untuk digunakan (Pertiwi, 2018). Bentuk uang digital benar-

benar menawarkan manfaat yang berbeda dibandingkan standar moneter yang sebenarnya. Meskipun demikian, ada potensi luar biasa untuk pemanfaatannya untuk tujuan palsu, misalnya, untuk penghindaran pajak, atau untuk melakukan kesalahan representasi dengan menawarkan Penawaran Koin Awal (ICO) palsu dan kemudian mencuri aset pendukung keuangan yang telah membeli ICO.

Kekeliruan menggunakan instrumen uang kriptografis benar-benar menantang untuk diikuti karena klien dapat menggunakan akun dengan alias, mereka dapat lolos dari tinjauan (Hadi 2018) Potensi pemerasan dengan menggunakan inovasi canggih telah diakui oleh Relationship of Guaranteed Extortion Analysts/ ACFE Indonesia Part atau ACFE IC), dengan cara ini meyakinkan pelaksanaan Public Enemy of Extortion Meeting (NAFC) pada tahun 2018 dengan mengangkat subjek misrepresentasi dalam klasifikasi pemeriksaan mata uang digital sebagai salah satu pembicaraan utama pada pertemuan tersebut (Artikel CNBC 2018). Selain itu, IC ACFE juga mengacu pada beberapa model misrepresentasi yang pelaksanaannya lebih sederhana dengan pemanfaatan teknologi terkomputerisasi (Relationship of Guaranteed Extortion Inspectors (ACFE) Indonesia Part, 2018), yang pertama adalah peretasan, khususnya dengan memasukkan informasi keuangan dan informasi penting lainnya oleh programmer, yang kemudian digunakan untuk peningkatan individu.

Berikutnya adalah malware, yaitu dengan memanfaatkan infeksi untuk merusak sistem pembukuan di dalam organisasi. Kemudian desain ramah, yang memanfaatkan inovasi terkomputerisasi untuk mengungkap data pribadi tentang dana organisasi. Ada juga pelanggaran kehormatan, yang merupakan perlakuan buruk terhadap akses yang diberikan ke data organisasi yang signifikan, dan gangguan aktual, yang mendapatkan informasi organisasi tanpa persetujuan dan tanpa memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Menurut pemanfaatan pembukuan wilayah publik untuk mencegah pungli, mengacu pada pelaksanaan tujuh komponen yang meliputi persiapan publik, perencanaan publik, pengakuan rencana keuangan publik, perolehan tenaga kerja dan produk publik, perincian keuangan publik, tinjauan area publik, dan tanggung jawab publik (Bastian, 2015). Eksekusi ketujuh komponen tersebut tidak terlepas dari pertarungan pungli, sebagaimana dimaknai oleh Free (2015) tentang misrepresentation triangle, bahwa pungli dapat terjadi karena tiga unsur, yaitu peluang, ketegangan, dan legitimasi. Dikombinasikan dengan kehadiran inovasi terkomputerisasi yang tampaknya memberikan pintu terbuka yang lebih penting dan menambahkan faktor pembatas seperti yang diungkapkan dalam hipotesis batu mulia yang keliru (Ruankaew, 2016; Sujeewa et al., 2018).

Batasan yang disinggung untuk situasi ini adalah kemampuan untuk melakukan misrepresentasi dengan menggunakan item inovasi lanjutan yang berbeda. Misrepresentasi pada dasarnya dapat dicirikan menjadi tiga jenis, yaitu penyalahgunaan sumber daya, pernyataan yang menyesatkan dalam ringkasan anggaran, dan pencemaran nama baik (Sihombing, Erlina, Rujiman, dan Muda, 2019). Bagaimanapun juga, menurut klarifikasi dari ACFE IC, kehadiran inovasi komputerisasi dengan item yang berbeda mungkin dapat mendorong perbaikan strategi untuk melakukan pungli dalam tiga jenis misrepresentasi (Relationship of Guaranteed Extortion Analysts (ACFE) Indonesia Section, 2018). Oleh karena itu, sesuai dengan asal mula perlunya pembinaan batas logika Pembukuan Daerah untuk mengikuti perkembangan inovasi yang terkomputerisasi, maka perlu pula dibentuk suatu model penyelenggaraan Pembukuan Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah pungli. dalam waktu komputerisasi. ACFE IC mengusulkan metodologi penting untuk mengatasi misrepresentasi yang dapat diterapkan oleh area publik secara khusus dan area bisnis lainnya. Sistem ini berpusat pada upaya untuk mencegah kemalangan informasi (Relationship of Guaranteed Extortion Analysts (ACFE) Indonesia Section, 2018).

Jenis sistem yang harus dimungkinkan adalah dengan memanfaatkan administrasi petugas perlindungan yang mengetahui inovasi dan regulasi, memiliki program kerja,

dapat menetapkan strategi keamanan informasi, di samping inovasi dan instrumen yang diharapkan dapat menjaga informasi organisasi, memahami pentingnya kerahasiaan informasi klien dan informasi perusahaan, mengawasi informasi jaringan dengan web untuk menjamin kenyamanan web of things (IoT) dan mencegah peristiwa pemisahan informasi organisasi dari pertemuan luar, memutuskan tingkat privasi informasi organisasi dan tingkat ahli untuk akses informasi, menetapkan rencana detail dan fokus pada idealisme pengungkapan, serta melakukan pengecekan dan pengendalian informasi secara konsisten. sedang berlangsung. Kekeliruan diterima terjadi karena kesempatan luar biasa untuk melakukannya.

Oleh karena itu, hal penting yang harus dimungkinkan untuk mencegah misrepresentasi adalah mematikan pintu terbuka ini dengan memperluas pelaksanaan kerangka pengendalian ke dalam, menggunakan administrasi penelaahan dalam dan luar, mengarahkan penilaian pemerasan, dan menerapkan pembukuan yang sah, baik secara fisik maupun dalam struktur yang terkomputerisasi. (pembukuan terukur tingkat lanjut) (Jasa Eksplorasi dan Inovasi Republik Indonesia, 2019). Misrepresentasi adalah kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan secara eksklusif atau seluruhnya, dan kehadirannya dapat berubah menjadi penyakit sampar atau penyakit mematikan yang menular di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, selain membuka pintu-pintu terbuka yang memungkinkan seseorang melakukan pemerasan, upaya kedua yang harus dilakukan adalah memusuhi budaya misrepresentasi atau budaya dapat dipercaya di dalam organisasi (Layanan Eksplorasi dan Inovasi Republik Indonesia). Indonesia, 2019).

Seperti yang dikemukakan dalam hipotesis Conduct Bookkeeping, bahwa cara berperilaku manusia memiliki hubungan yang nyaman dengan kerangka pembukuan, dimana perubahan yang terjadi di satu sisi akan menjadi faktor pemicu perubahan di sisi yang berlawanan (Supriyono, 2018). Oleh karena itu, jika organisasi dapat membuat musuh budaya misrepresentasi memiliki pilihan untuk mengubah cara berperilaku setiap individu dari organisasi, maka, pada saat itu, penyesuaian yang berlarut-larut ini akan menjadi batasan. untuk pemerasan. Ini diselesaikan dengan menanamkan nilai keaslian dan memahami konsekuensi buruk dari representasi yang salah pada semua aspek organisasi. Klarifikasi tersebut disampaikan kepada pihak dengan situasi paling penting dalam organisasi kepada staf pada tingkat paling rendah oleh pemegang buku atau oleh staf pejabat perlindungan yang secara eksplisit menguraikan masalah pemerasan dalam organisasi (McMahon, Pence, Bressler, dan Bressler , 2016). Muhtar, Sutaryo, dan Sriyanto (2018) menganalisis pungli sebagai pencemaran nama baik yang terjadi dalam organisasi terbuka di Indonesia dengan mengacu pada hipotesis misrepresentation triangle.

Konsekuensi dari eksplorasinya mengungkapkan bahwa kemerosotan secara keseluruhan dan dampak negatif dari tanggung jawab eksekusi, menyiratkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab yang lebih baik yang ditunjukkan oleh organisasi pemerintah akan menjadi salah satu pendorong berkurangnya misrepresentasi yang terjadi di area publik. Tanggung jawab pelaksanaan yang besar akan mengurangi ketegangan yang didapat oleh area publik dari area lokal dan semua mitra, sehingga ini akan membuat tujuan melakukan misrepresentasi pada setiap individu dari area publik menjadi berkurang. Peristiwa pungli pada masa lanjut semakin sulit diidentifikasi karena adanya instrumen baru yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Ketika akibat merugikan seperti kemalangan untuk skala yang sangat besar telah dirasakan, baik sebagai kemalangan moneter maupun kemalangan dalam perspektif yang berbeda, maka, pada saat itu, organisasi hanya melihat ke pemerasan. Dengan demikian, upaya pencegahan pungli pada umumnya difokuskan pada strategi identifikasi yang bersifat preventif. Seiring dengan kemajuan teknologi yang terkomputerisasi, teknik pemerasan juga harus terus dikembangkan agar dapat diterapkan dengan sukses dan dapat mengidentifikasi tanda-tanda kekeliruan dengan memanfaatkan inovasi terkomputerisasi.

Seperti yang ditunjukkan oleh (Wearing, Eriksson, Martikainen, dan Lehner, 2019),

perbaikan sistem identifikasi kesalahan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena mencakup inovasi baru dan membutuhkan bantuan keuangan dari organisasi yang secara eksplisit menunjuknya untuk memerangi pemerasan. Bagaimanapun, pelaksanaan sistem akan benar-benar ingin membantu organisasi dalam memeriksa, menghancurkan, berpikir, dan mengajukan berbagai upaya brilian untuk membedakan dan memerangi pemerasan. Kerangka kerja pengenalan misrepresentasi yang menyelesaikan latihan mereka menggunakan tiga strategi utama, khususnya perhitungan AI, penambangan informasi, dan meta-learning dapat memiliki pengetahuan yang terus berkembang seiring siklus yang dilaluinya. Kerangka kerja tersebut dapat menyimpan data tentang strategi dan kualitas representasi yang salah dan membedahnya untuk memberikan tanda pemerasan, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam pemerasan.

Simpulan dan Saran

Hasil akhir dari tinjauan tersebut adalah sifat-sifat utama pungli di tempat umum yang terjadi di masa depan, termasuk pemanfaatan salah tafsir tentang tugas inovasi komputerisasi dalam pelaksanaan kewajiban pembukuan publik, penggunaan inovasi canggih untuk mengefisienkan peluang untuk melakukan misrepresentasi, memanfaatkan masalah human error dan ketiadaan informasi dalam pemanfaatan inovasi terkomputerisasi, memanfaatkan item inovasi canggih, seperti mata uang digital, hingga melakukan misrepresentasi. Selain itu, pemanfaatan Pembukuan Area Publik dapat mencegah pungli di area publik dalam periode komputerisasi dengan asumsi bahwa hal itu diselesaikan dengan memikirkan faktor-faktor yang berdampak pada misrepresentasi, seperti tanggung jawab eksekusi, dan digabungkan dengan penggunaan teknik penangkalan misrepresentasi yang menggabungkan prosedur khusus, pendekatan dua pandangan dunia, dan sistem pencegahan. Prosedur khusus ini mencakup upaya penghindaran pemerasan dengan menggunakan administrasi resmi perlindungan, akses IoT, mengawasi akses informasi, memberikan pengungkapan yang ideal, dan mengontrol informasi secara bertahap.

Pendekatan dua pandangan dunia terletak pada upaya menjadikan budaya pemerasan sebagai musuh dan membuang peluang terjadinya misrepresentasi melalui pelaksanaan kontrol interior. Teknik preventif adalah peningkatan kerangka penemuan misrepresentasi yang dijalankan dengan memanfaatkan perhitungan mesin, penambangan informasi, dan strategi meta learning. Temuan penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan melihat dampak penggunaan Pembukuan Area Publik pada misrepresentasi dengan memanfaatkan unsur-unsur teknik khusus, sistem pencegahan, pendekatan dua pandangan, dan tanggung jawab pelaksanaan sebagai faktor mediator. Pemeriksaan dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi kuantitatif dengan informasi penting untuk mendapatkan penemuan faktual yang tepat. Terkait dengan objek pemeriksaan, salah satu area publik yang tidak berdaya melawan pungli dapat dipilih berdasarkan informasi asli yang dapat dikumpulkan oleh para ahli.

Referensi

- Abri, A. F., Arumugam, D., & Balasingam, S. 2019. Impact of the Corporate Governance on the Financial Statement Fraud: A Study Focused on Companies in Tanzania. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(58), 336–341.
- Akay, E. M., Poputra, A. T., & Kalalo, M. Y. B. 2016. Analisis Aspek Keperilakuan Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan Pada PT. Surya Wenang Indah Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 688–697.
- Aksa, A. F. 2018. Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 1–17.

- Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. 2017. Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 157–166.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. 2017. *Survai Fraud Indonesia 2016*. In Auditor Essentials. Jakarta. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter. 2018, August). Sewindu ACFE Indonesia. *Majalah ACFE Indonesia - Investigate*. Bastian, I. 2015. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. In Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, B. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Cahyadi, I. F. 2019. Peranan Sistem Informasi Akuntansi dan Tantangan Profesi Akuntan di Era Revolusi Industri 4.0 (Sebuah Studi Fenomenologi). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 69.
- CNBC Editorial. 2018. Cryptocurrency Dibahas dalam Konferensi Anti-Fraud 2018. Retrieved January 10, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180719084159-4-24288/cryptocurrency-dibahas-dalam-konferensi-anti-fraud-2018>
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Quantitative And Qualitative Approach*. London: Sage Publishing.
- Donning, H., Eriksson, M., Martikainen, M., & Lehner, O. M. (2019). Prevention and Detection for Risk and Fraud in the Digital Age – the Current Situation. *ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, 8, 86–97.
- Enyi, P. 2019. Relational Trend Analysis: A Simple and Effective Way To Detect Financial Statements Fraud. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 9(2), p8669.
- Eyo Bassey, B. 2018. Effect of forensic accounting on the management of fraud in microfinance institutions in cross river state. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 9(4), 79–89.
- Free, C. 2015. Looking Through the Fraud Triangle: A Review and Call for New Directions. *SSRN Electronic Journal*, (January 2015).
- Hadi, R. 2018. Ini Bentuk Kecurangan Dan Korupsi Finansial di Era Digitalisasi. Retrieved January 10, 2020, from Bukamata website: <https://www.bukamata.co/berita/8506/ini-bentuk-kecurangan-dan-korupsi-finansial-diera-digitalisasi/>
- Halim, A. 2016. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hantono. 2018. Analisis Pendeteksian Financial Statement Fraud Dengan Pendekatan Model Beneish Pada Perusahaan Bumn. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 254–269.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Revisi*. Jakarta.
- Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2018). Menristekdikti: Profesi Akuntan Harus Beradaptasi Dengan Revolusi Industri 4.0. Retrieved January 10, 2020, from Siaran Pers Kemenristekdikti website: <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/menristekdikti-profesi-akuntan-harus-beradaptasi-dengan-revolusiindustri-4-0/>
- Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2019. Sesjen Kemenristekdikti Minta Calon Akuntan Profesional Dibekali Kemampuan Deteksi Tindak 'Fraud' dan Korupsi di Era Digital. Retrieved January 10, 2020, from Siaran Pers Kemenristekdikti website: <https://www.ristekbrin.go.id/kabar/sesjen-kemenristekdiktiminta-calon-akuntan-profesional-dibekali-kemampuan-deteksi-tindak-fraud-dan-korupsi-di-era-digital/>
- Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. 2018. *Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved January 10, 2020, from Anti Corruption Clearing House website: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>
- Kruskopf, S., Lobbas, C., Meinander, H., Söderling, K., Martikainen, M., & Lehner, O. M. 2019. Digital Accounting : Opportunities, Threats and the Human Factor. *Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives*, 8(Digital Accounting), 1–15.
- Kutluk, F. A. 2017. Behavioral Accounting and its Interactions. *Accounting and Corporate Reporting - Today and Tomorrow*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.68972>

- McMahon, R., Pence, D., Bressler, L., & Bressler, M. S. 2016. New Tactics In Fighting Financial Crimes: Moving Beyond The Fraud Triangle. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 19(1), 16–25.
- Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. 2018. Corruption in Indonesian local government: Study on triangle fraud theory. *International Journal of Business and Society*, 19(2), 536–552.
- Omar, M., Nawawi, A., & Salin, P. 2016. The Causes, Impact And Prevention Of Employee Fraud - A Case Study Of An Automotive Company. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1012–1027.